



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2022 : <https://ciastech.widyagama.ac.id>

Open Confrence Systems : <https://ocs.widyagama.ac.id>

Proceeding homepage : <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/index>

BAHASA KEKUASAAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA

Anwar^{1*}, Fredy Rahalus²⁾

^{1,2)}Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 2 Oktober 2022

Direvisi, 31 Oktober 2022

Diterima, 8 November 2022

Email Korespondensi :

anwar_cengkeng@yahoo.co.id

ABSTRAK

Dalam bahasa Yunani Kuno, manusia disebut *Homo ludens*. Dalam perspektif Wittgenstein, politik kemudian dapat didefinisikan sebagai permainan yang membutuhkan permainan bahasa sebagai alat komunikasi. Semua sistem politik yang dipraktikkan di seluruh dunia menggunakan permainan bahasa, dan sistem demokrasi adalah yang paling bergantung pada bahasa permainan. Melalui permainan, lembaga politik mendapatkan suara dan mengumpulkan simpati dari rakyat. Dengan berlatih permainan bahasa satu membujuk orang lain agar memiliki pendapat atau ide yang sama. Karena itu, seseorang harus berhati-hati dan kritis dalam menimbang pernyataan politik, mempertanyakan makna apa yang ada di baliknya, dalam demokrasi sistem. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara bahasa dan kekuasaan politis. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Bahasa dan politik memiliki hubungan saling terkait dengan makna di dalamnya yang nampaknya sama. Unsur permainan bahasa dalam politik juga tuurt berperan. Dan demokrasi sebagai sebuah sistem dipraktikkan permainan bahasa politik di dalamnya.

Kata Kunci: Wittgenstein, Permainan bahasa, Demokrasi

1. PENDAHULUAN

Sejak runtuhnya zaman mitos pada abad VI SM, maka dunia memasuki zaman baru yaitu zaman Logos. Pada zaman ini akal mendapatkan tempat yang terhormat. Penggunaan akal dalam mencari kebenaran, sikap kritis dalam menerima kebenaran, dan jawaban-jawaban spekulatif yang diberikan menyebabkan filsafat berkembang cepat. Perkembangan filsafat ini merupakan benih munculnya ilmu pengetahuan. Sejarah filsafat yang sekaligus juga ilmu pengetahuan ini memang tidak tuntas dalam memberikan jawaban masalah-masalah manusia. Jawaban yang diberikan 2 bersifat spekulatif, terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Jawaban yang diberikan untuk sementara mampu menjelaskan problem awal filsafat seperti, epistemologi (pengetahuan), kosmologi (alam), metodologi, etika, anthropologi (manusia), teologi (Tuhan). Dalam sejarah

perkembangannya, buah-buah pemikiran dalam diskusi filsafat pun turut berubah dan berkembang. Di dalam filsafat itu sendiri yang berfokus pada pertanyaan tentang ada (seperti didiskusikan oleh Aristoteles, Thales, Plato, Descartes, dan para filsuf lainnya), di abad ke-20 terjadi perubahan diskusi di dalamnya, yakni tertuju kepada diskusi tentang makna bahasa (linguistik). Simbol-simbol sebagai bentuk sederhana dari bahasa itu berkembang ke arah yang lebih kompleks. Hal ini lebih dapat disebabkan oleh eksistensi bahasa yang ada sejak manusia itu ada. Terlepas dari diskusi tentang makna bahasa yang semakin kompleks, di dalam politikpun bahasa tidak dapat dipisahkan.

Secara sederhana misalnya, di dalam alam pikiran Aristoteles mencoba memberikan sebuah definisi tentang eksistensi manusia sebagai *Animal Sociale* atau *Zoon Politicon*. Hal ini dapat dimaknai sebagai karakteristik inheren dari manusia itu sendiri, yakni ia adalah binatang yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu hidup bersama dan membutuhkan orang lain. Ini dapat berarti bahwa manusia dengan eksistensinya sebagai *animal sociale* tidak dapat dipisahkan dari keterberianya kepada orang lain. Ia ada dan bersama dengan orang lain. Dari sudut pandang politik, segala sesuatu termanifestasikan melalui bahasa. Kehendak dan hasrat kekuasaan disampaikan lewat dan dalam bahasa. Bagaimana bahasa selalu bermakna kompleks dan mengandung sejuta makna di dalamnya, direfleksikan dan dianalisis pertama kali oleh seorang filsuf berkebangsaan Jerman yakni Wittgenstein.

Satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam konteks perkembangan ideologi demokrasi saat ini yakni keberadaan rakyat yang kemudian dari sudut para pemangku kepentingan kekuasaan menjadikan rakyat sebagai sasaran tembak utama untuk mengeruk, menaikan, meningkatkan proyeksi kemenangan mereka. Rakyat dalam hal ini menjadi objek dari kekuasaan itu sendiri. Hal ini lebih dapat disebabkan oleh kepentingan kekuasaan itu sendiri. Kekuatan disusun untuk mencari dukungan yang sebesar-besarnya demi memuluskan cita-cita para penguasa. Bahasa-bahasa politik, janji-janji politik, hasrat berkuasa dilontarkan dalam bahasa politik yang dibuat sedemikian rupa untuk mengelabui para pendengar. Oleh karenanya sikap kritis diperlukan termasuk kemampuan untuk menh analisis setiap bahasa yang dilontarkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif filosofis yaitu dengan berupaya memberikan gambaran yang jelas tentang beberapa masalah mendasar yang menjadi perhatian dalam tulisan ini dengan analisis filosofis sebagai pisau kritiknya. Kemudian, di dalam metode ini terdapat interpretasi, yaitu melakukan interpretasi terhadap teori Wittgenstein dalam rangka melihat dan memahami bahasa politik. Dan pada bagian akhir dari tulisan ini disertai dengan analisa sintesa, yaitu melakukan analisa secara cermat terhadap beberapa permasalahan, dicari penyebab pokok permasalahan dan hubungan beberapa hal tersebut. Dari beberapa analisa ini dibuat satu sintesa yang menghasilkan gambaran umum pembahasan dalam kerangka teori Wittgenstein.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahasa Instrumen Meraih Kekuasaan

Hal-hal yang bersinggungan dengan persoalan dalam politik terkait kekuasaan, pengambilan kebijakan publik, pengaturan kepentingan bersama merupakan masalah yang sangat rumit dan kompleks. Dari sini dapat dilihat bahwa di dalam adanya relativisme dan labilitas terkait kebenaran dalam politik itu sendiri. Apakah yang digaungkan dalam politik melalui bahasa politik sudah benar-benar bahasa yang di dalamnya terkandung kebenaran dari tujuan politik atau tidak. Oleh karenanya, sebuah pemahaman akan bahasa yang digunakan politik harus dicermati dan dianalisis

sebaik mungkin. Perbedaan antara kebenaran dengan ketidakbenaran sangat tipis. Sesuatu yang dianggap salah secara politis dengan mudah akan menjadi benar dalam perspektif pihak lain yang kemudian berkuasa. Untuk membedakan mana yang benar dan tidak benar dalam politik, sukar ditentukan karena muatan kepentingan politik mendominasi. Kebenaran politis lebih relatif dari pada kebenaran hukum, kebenaran ilmiah, dan kebenaran lain yang mempunyai tolok ukur yang jelas. Bahasa merupakan instrumen kekuasaan simbolik.

Salah satu perbedaan hakiki antara tingkah laku manusia dan hewan adalah bahwa hewan tidak bisa memakai bahasa. Ada tingkah laku hewani yang tampaknya sudah dekat dengan pemakaian bahasa, tetapi jika diperiksa dengan lebih teliti tidak boleh disetarakan dengan pemakaian bahasa. Jika ada hewan yang bisa berkomunikasi dengan temannya, hal itu terjadi melalui sinyal, sedangkan manusia dan hanya manusia bisa berkomunikasi melalui simbol, sehingga tingkah laku simbolis adalah tingkah laku manusiawi yang khas. Ernest Cassier menyebut manusia *animal symbolicum*. Dengan ini, hanya manusia yang dengan leluasa dan syarat akan makna dalam penggunaan bahasa. Ia tidak bisa disamakan dengan hewan yang sekalipun dapat berbahasa. Itu hanya lebih dapat disebabkan oleh kemampuan instingtif dari hewan itu sendiri.

Bahasa berfungsi sebagai sarana dalam melakukan kontrol ideologis dan kontrol kekuasaan. Dalam ilmu bahasa, analisis wacana kritis tidak semata-mata digunakan untuk menganalisis teks media (seperti dalam ilmu komunikasi). Penggunaan simbol-simbol dalam bentuk bahasa tidak selalu mengandung makna yang riil terkadang juga bersifat abstrak dan manipulative. Di dalam politik, bahasa dapat diartikan sebagai penggambaran realitas dengan mempolitikasi bahasa-bahasa tertentu. Dari sini juga dapat dipahami bahwa bahasa sebagai media penguat dan melegitimasi realitas politik. Hingga sampai kepada pemahaman yang umum bahwa bahasa sebagai alat untuk menciptakan realitas tentang dunia yang dimaknai dan dikonsepsikan sebagai kebenaran. Realitas dalam hal ini dibuat seolah-olah benar melalui pencitraan yang melahirkan membenaran. Bahasa pada akhirnya menjadi alat untuk mengkonstruksi realitas menjadi salah dan benar (hegemoni). Bahasa selanjutnya menjadi alat legitimasi kekuasaan dan dapat menciptakan deskriminasi dan marginalisasi.

Kecerdasan dan kecermatan dalam mengamati setiap frasa dalam bahasa politik menjadi penentu apakah tujuan politik itu benar-benar tertuju kepada kepentingan rakyat atau tidak. Disinilah peran bahasa sangat penting sebagai media komunikasi untuk meyakinkan, mengambil hati, menarik simpati agar rakyat memberikan suaranya. Oleh karenanya penting untuk melihat sisi penting dari bahasa. Pertama fungsi persuasi dimana bahasa ditempatkan untuk mempengaruhi pikiran dan mengubah sikap audiens seperti apa yang diinginkannya. Bahasa yang digunakan dalam pidato, ceramah, kampanye terkandung di dalamnya sederet kepentingan politis. Peran seorang pembicara menempati posisi paling krusial dalam hal ini. Artinya, apa yang disampaikan harus mampu memilah mana yang merupakan kebutuhan pendengar sehingga bahasa yang disampaikan mampu menarik pendengar. Dengan ini tercipta kesatuan ide dan gagasan. Janji-janji atau pidato yang indah dan ideal sering disampaikan demi sebuah tujuan. Dalam konteks pesta demokrasi, di masa-masa kampanye banyak muncul statemen yang pantas diragukan kebenarannya yang membuat bingung orang banyak.

Kemampuan penutur yang mampu menguasai dan memahami kebutuhan pendengarnya, dalam terang pemikiran Austin misalnya disebut sebagai tindakan perlokusi. Ini berarti ada pengaruh atau dampak yang lahir dari si penutur. Singkatnya, ada unsur kesengajaan dari si penutur untuk mempengaruhi pendengar secara maksimal melalui tuturan yang disampaikan. Kemudian, bahasa dapat berfungsi sebagai media untuk menyampaikan atau menuturkan ancaman. Namun, unsur ancaman dalam bahasa itu dapat bergantung pada bagaimana pendengar memahami dan menilainya. Artinya, nilai ancamannya bersifat relatif. Anda harus memilih saya, jika tidak tidak memilih saya maka bantuan yang dijanjikan akan dibatalkan. Ini adalah salah satu contoh dari

ancaman dalam bahasa politik. Makna ancamannya dapat bersifat relative dan tidak berada pada posisi yang sangat mengancam eksistensi pendengarnya. Jadi, bahasa yang digunakan baik persuasif maupun bahasa mengancam pada dasarnya untuk mengamankan kepentingan penutur.

Lebih lanjut bahwa penutur sering terkondisi dalam situasi dimana ia harus melakukan kebohongan, menutupi sesuatu merupakan suatu siasat mengalahkan pihak lain adalah gambaran fakta dalam penggunaan bahasa politik. Seorang empiris Inggris Thomas Hobbes mengajukan keberatan penting tentang demokrasi. Demokrasi selalu membutuhkan retorika. Retorika hanya mengutamakan efek bukan isi. Retorika mengakibatkan keputusan yang ditentukan oleh penyalahgunaan pikiran (*impetus animi*) dari pada penalaran yang benar (*recta ratione*). Retorika memburu kemenangan daripada kebenaran, sehingga bahasa yang digunakan mempunyai efek persuasi yang berfungsi pragmatis mempengaruhi pendengarnya Hal ini terjadi bukan semata-mata kesalahan penutur. Dalam kenyataannya orang yang tidak bersikap kritis karena keterbatasannya mudah terbius dengan orasi yang memukau sehingga melupakan apa yang diungkapkan itu benar atau salah.

Dunia politik memang tidak dapat dipahami semata-mata secara rasional. Terdapat unsur-unsur lain yang dominan dalam kehidupan politik, seperti ideologi, emosi, psikologi, komunikasi dan juga personifikasi. Politik baik dalam skala besar maupun kecil selalu berkaitan dengan kepentingan. Sebagaimana kata Jurgen Habermas bahwa bahasa adalah kepentingan. Kepentingan dari siapa yang memakainya. Mereka yang memiliki kekuasaan selalu membangun bahasanya sendiri untuk mengamankan bahkan memperbesar kekuasaannya. Hal ini senada dengan para pengikut aliran pemikiran Max Weber yang diklasifikasi ke dalam cara pandang bahwa menguasai siapa saja dan apa saja dengan segala cara merupakan inti dominasi kekuasaan itu sendiri. Yang berkuasa mensubordinasi mereka yang dikuasai. Permainan bahasa dalam komunikasi politik adalah suatu kebutuhan. Sejauh mana permainan ini dilakukan oleh para aktor-aktor politik tergantung dari seberapa besar ketergantungan pada pihak lain atas kekuasaannya. Suatu kekuasaan semakin tergantung pada pihak lain (dukungan rakyat) akan semakin besar melakukan permainan bahasa.

Oleh karena itu, sebagaimana yang diutarakan pada bagian sebelumnya bahwa manusia dalam mempertahankan segala kondisi yang ada dan datang padanya (kekuasaan yang ada dan dicari hingga datang padanya) dapat diinterpretasikan melalui penggunaan simbol-simbol tertentu, terutama dalam hal ini adalah bahasa dalam politik. Hanya manusia yang bisa memakai simbol. Simbol adalah tanda yang mewakili atau menggantikan apa yang ditandakan. Di sini tidak ada lagi hubungan langsung dengan keadaan konkret. Yang ada hanyalah selubung makna di setiap penuturan bahasa, dalam hal ini adalah bahasa politik. Kita juga dapat mengatakan bahwa melalui bahasa manusia dapat menghadirkan apa yang tidak hadir. Berkat adanya kemungkinan tingkah laku simbolis ini manusia dapat menggunakan bahasa. Tetapi akhirnya harus diakui bahwa tingkah laku simbolis dengan bahasa-bahasa politis dalam artian yang sebenarnya tidak pernah menyingkapkan kebenaran otentik dari si penutur.

4. KESIMPULAN

Terdapat hubungan yang erat antara politik dan bahasa. Wacana politik tidak bisa dipisahkan dengan bahasa. Dalam kehidupan politik terutama dalam era demokrasi dibutuhkan komunikasi yang intens baik secara vertikal maupun horizontal. Bahasa dipergunakan sebagai media dalam komunikasi politik. Di dalam penggunaan bahasa politik terdapat permainan bahasa. Di antara berbagai sistem politik sistem demokrasi adalah yang paling banyak membutuhkan permainan bahasa. Dalam demokrasi pemilik suara adalah rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat. Pelaksana kedaulatan rakyat ini berusaha mencari simpati dan kepercayaan untuk menyerahkan kewenangannya. Dalam hal ini diperlukan bahasa persuasif untuk meyakinkan rakyat.

5. REFERENSI

- [1] Bakker, Anton dan Charis Zubair. 1990. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.
- [2] Bertens, Kees. 1983. Filsafat Barat Abad XX: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia.
- [3] Hikam, AS. 1999. Demokrasi dan Civil Society. Jakarta: LP3ES.
- [4] Kaelan. 1998. Filsafat Bahasa, Masalah dan Perkembangannya. Yogyakarta: Paradigma.
- [5] Mustamsyir, Rizal. 1987. Filsafat Analitik: Sejarah dan Perkembangan dan Peranan Para Tokohnya. Jakarta: Rajawali Pers.
- [6] Nasir, Haedar. 1999. Pragmatisme Politik Kaum Elit. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [7] Purwoko, Herudjati. 2011. Kaitan Bahasa dan Politik dalam Perspektif Budaya. Makalah dalam Seminar Nasional FIB UNDIP, Semarang.

Halaman Sengaja di Kosongkan